

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyebab terjadinya konflik antara otoritas tradisional dengan otoritas modern dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari Ketaping. Hal tersebut didasari oleh fenomena unik yang terdapat di Nagari Ketaping yakni tentang adanya dualisme kekuasaan: Rajo Sampono sebagai pemegang kekuasaan tradisional dan wali nagari dalam kekuasaan modern. Namun, dalam perjalanannya kedua otoritas tersebut tidak dapat berjalan masing-masing sesuai dengan bidang kepemimpinannya. Kehadiran otoritas modern setelah otoritas tradisional menyebabkan otoritas modern “terjebak” dalam budaya kekuasaan di Nagari Ketaping yang sudah lebih dahulu terbentuk. Hal ini berimplikasi pada penempatan otoritas modern yang harus bergerak sesuai aturan yang telah dibangun otoritas tradisional sejak lama. Permasalahan yang semakin meruncing juga dipengaruhi kesalahpahaman Yulisman sebagai pemegang otoritas modern yang tidak memahami dengan baik “aturan main” tersebut—mereka memiliki dua budaya yang berbeda.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa penyebab konflik kepentingan yang terjadi di Nagari Ketaping disebabkan oleh beberapa hal: *pertama*, persoalan masa hadir yang sangat signifikan antara kedua otoritas yang ada sehingga berpengaruh pada

eksistensi masing-masing jenis otoritas. Semangat penyelenggaraan pemerintahan modern Sumatera Barat dalam *babaliak ka nagari* baru berjalan dua belas tahun. Sementara itu, kekuasaan tradisional Rajo Sampono telah memimpin Nagari Ketaping dengan *iduik banagari* selama kurang lebih 200 tahun.

Kedua, otoritas tradisional yang telah hadir jauh-lebih-dulu membentuk budaya memerintah yang sangat kuat dan terjaga sampai saat ini—inilah entitas kultural Nagari Ketaping; kehadiran pemerintahan modern bagaikan sebuah lingkaran kekuasaan yang kecil dalam sebuah lingkaran kekuasaan yang lebih besar. Kekuasaan tradisional Rajo Sampono telah merasuk hingga ke jantung masyarakatnya.

Ketiga menyangkut tentang identitas-peran—persoalan interaksi. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa identitas-peran terdiri dari gambaran diri yang bersifat ideal yang dimiliki individu sebagai seorang yang menduduki berbagai posisi kelas sosial. Di dalam realita, identitas-peran ini diungkapkan secara terbuka dalam pelaksanaan peran—“siapa saya”. Dalam konteks konflik ini, Rajo Sampono dan Yulisman berada dalam satu arena yang sepenuhnya milik Rajo Sampono.

Terakhir, faktor kesalahpahaman budaya. Budaya juga berarti pengetahuan. Kedua otoritas yang terlibat dalam konflik berasal dari dua kebudayaan yang berbeda. Yulisman sebagai pemegang otoritas modern memang merupakan putra asli Nagari Ketaping. Namun begitu Yulisman tidak begitu mengerti tentang budaya politik di Nagari Ketaping karena ia besar di perantauan.

Saat kembali ke Ketaping ia mencoba untuk menerapkan budayanya yang pada akhirnya menyebabkan *cultural shock*. Beberapa penyebab itulah yang telah dideskripsikan pada bagian “temuan dan analisis data” dengan menggunakan metode etnografi yang menuntut penelaahan bahasa asli dan *setting-setting* fenomena, dengan harapan dapat menghadirkan deskripsi kompleksitas budaya kekuasaan yang terdapat di Nagari Ketaping sehingga mampu menjelaskan tujuan dari penelitian ini.

6.2 Saran

Dari pemaparan hasil penelitian, peneliti menekankan betapa pentingnya memahami sebuah kebudayaan dalam berinteraksi. Setiap orang memiliki proses enkulturasi yang berbeda-beda dalam membentuk budayanya. Konflik dapat lahir dari ketidakpahaman budaya yang datang kepada kita. Namun dari awal proses penelitian, peneliti telah menegaskan bahwa tulisan ini tidak bertujuan memberikan penilaian baik atau buruk terhadap segala bentuk kejadian yang ada di Nagari Ketaping. Apa-apa yang terjadi di Nagari Ketaping hanya dapat dimengerti oleh mereka yang hidup di sana. Peneliti memandang ini sebagai bentuk kekayaan budaya Nagari Ketaping yang berkontribusi dalam menuju kestabilan perjalanannya ke masa depan.

Penelitian ini belum membicarakan dan masih menyisakan hal penting lainnya dalam permasalahan konflik otoritas tradisional dan modern yang ada di Nagari Ketaping. Namun jika ada yang ingin melanjutkan penelitian ini, peneliti

menyarankan fokus berikutnya adalah tentang dampak konflik otoritas di bidang pemerintahan dan sikap masyarakat terhadap konflik yang terjadi.

